

Analisis Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Belanja Langsung Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

Naomi Christine Sarah ✉, Rimi Gusliana Mais

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta, Indonesia

97

Abstract

This research analyzes the system and procedures for direct spending in the Provincial Government of North Sulawesi to evaluate the effectiveness of monetary policy implementation and provide suggestions for improvement. With regional autonomy, enhancing accountability and transparency in financial management becomes crucial, particularly regarding direct cash expenditures. Although efforts have been made to improve spending efficiency, results often fall short of targets, indicating a need to strengthen the accounting system. The methodology employed is a qualitative descriptive approach, analyzing the financial reports of the Provincial Government of North Sulawesi as of December 2024. The results indicate that, despite efforts toward transparency, challenges in implementing government spending lead to a backlog of realizations at the end of the fiscal year and low budget absorption. This research is expected to significantly enhance accountability and transparency in public financial management at the regional level.

Keywords: Financial Management Transparency, Provincial Government of North Sulawesi, Regional Autonomy

Paper type: Research paper

Received 6/20/2025
Revised 9/12/2025
Accepted 12/19/2025
Online First 12/30/2025

Jurnal Akuntansi STEI
Vol 8, No.2, 2025, 97-106

p-ISSN 2442-4072

✉ Corresponding:

Naomi Christine Sarah (Email:Naomichristines14@gmail.com)



© The Author(s) 2025

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).use.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis sistem dan prosedur belanja langsung di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan moneter dan memberikan saran perbaikan. Dengan otonomi daerah, peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan menjadi penting, terutama terkait pengeluaran kas langsung. Meskipun ada usaha untuk meningkatkan efisiensi belanja, realisasi sering kali tidak memenuhi target, menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem akuntansi. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis laporan keuangan pada Desember 2024. Hasil menunjukkan bahwa meskipun ada upaya transparansi, tantangan dalam pelaksanaan belanja pemerintah menyebabkan penumpukan realisasi di akhir tahun anggaran dan rendahnya penyerapan anggaran. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik di daerah.

Kata Kunci: Transparansi Pengelolaan Keuangan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Otonomi Daerah

1. Pendahuluan

Otonomi daerah mendorong pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penekanan pentingnya akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan keuangan. Dalam hal ini penerapan sistem dan prosedur akuntansi yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku sangat penting, terutama terkait dengan pengeluaran kas langsung. Penelitian ini berfokus pada analisis sistem dan prosedur belanja langsung pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan moneter serta memberikan saran perbaikan. Mengingat meningkatnya tuntutan terhadap kinerja pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi yang signifikan pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan keuangan publik (Rawung et al., 2023).

Sistem prosedur pengeluaran kas langsung di Indonesia merupakan komponen vital pada pengelolaan keuangan daerah, yang diatur dengan ketat untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran. Prosedur ini mengikuti pedoman yang ditentukan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang relevan, seperti Permendagri No. 77 Tahun 2020, yang mengatur pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Pengeluaran kas sering dipergunakan untuk membayar berbagai kebutuhan, termasuk belanja langsung. Mendagri No. 13 Tahun 2006 menguraikan bahwasannya belanja langsung ialah belanja yang dianggarkan secara langsung terkait akan pelaksanaan sejumlah program, sebagai uraian kebijakan SKPD pada bentuk kegiatan yang memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk tercapainya hasil terukur sesuai akan misi SKPD. Dengan demikian, belanja langsung merupakan kegiatan pengeluaran daerah yang dianggarkan dan berkaitan langsung akan pelaksanaan kegiatan dan program pemerintah daerah (Dauhan et al., 2020).

Idealnya, belanja kas langsung wajib dilaksanakan dengan transparansi penuh, yang mana tiap pengeluaran bisa dipertanggungjawabkan pada publik. Laporan keuangan wajib memberi informasi jelas terkait penggunaan dana dan hasil yang dicapai. Tetapi, pada laporan keuangan realisasi belanja kas langsung biasanya target yang diinginkan tidak tercapai. Contohnya, walaupun terdapat usaha dalam meningkatkan efisiensi belanja dan pendapatan, realisasi belanja masih memperlihatkan angka yang kurang memuaskan.

Melalui penerapan transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan daerah, harapannya kepercayaan masyarakat bisa meningkat, khususnya mengenai penggunaan anggaran yang efektif dan efisien. Tetapi, menurut Sambali et al. (2024) tantangan pada pelaksanaan belanja pemerintah di Sulawesi Utara kerap menyebabkan penumpukan realisasi di akhir tahun anggaran dan rendahnya penyerapan anggaran. Belanja Langsung secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Perencanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan periode 2013-2019. Artinya setiap kenaikan atau penurunan Belanja Langsung berpengaruh signifikan terhadap Perencanaan Anggaran, oleh sebab itu pemograman dan kegiatan Belanja Langsung harus dioptimalkan lagi sehingga dapat berpengaruh terhadap Perencanaan Anggaran tahun berikutnya (Fathiny et al., 2021)

Sedangkan menurut Rawung et al. (2023) salah satu tugas administrasi terpenting dalam tata kelola pemerintahan ialah pengelolaan keuangan, yang membutuhkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan mewajibkan setiap organisasi untuk menjalankan anggaran dengan benar. Keputusan 190/PMK.05/2012 tentang Pelaksanaan Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Sebagai Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan. Pernyataan ini mencakup permohonan pembayaran, petunjuk pembayaran dan tata cara pencairan dana Kementerian Agama Sulawesi Utara terkait pengelolaan pembayaran tunai. Tarigan et al. (2023) menganalisis terkait Selisih Belanja dan Pertumbuhan Belanja memperlihatkan bahwasannya kinerja anggaran Bappeda Kota Pematangsiantar, sebagaimana Laporan Realisasi Anggaran dari tahun 2016 sampai 2020, secara keseluruhan cukup positif. Berdasar Analisis Keceratan Belanja dan Analisis Efisiensi Belanja, bisa diambil kesimpulan bahwasannya Bappeda sudah melaksanakan kinerja anggarannya secara efisien dan baik. Walaupun terdapat sejumlah program kegiatan yang belum dioptimalkan pada penggunaan SiLPA, anggaran secara keseluruhan tetap bisa dijalankan. Pada sistem anggaran berbasis kinerja, SiLPA dari tahun sebelumnya bisa dipergunakan selaku tambahan pada tahun anggaran yang sedang berjalan. Bappeda Kota Pematangsiantar berkomitmen dalam memastikan bahwasannya sejumlah program yang dirancang untuk tahun mendatang menjadi prioritas utama pada pelaksanaannya.

Tujuan yang ingin dicapai ialah menganalisis kecukupan sistem dan prosedur pencairan pencairan tunai langsung Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini penting pula dalam memastikan bahwasannya lembaga pemerintah menjalankan regulasi yang sudah ditetapkan, menjadikannya meminimalisir risiko kesalahan pada pelaporan keuangan dan pengelolaan anggaran. Sulawesi Utara ialah salah satu provinsi di Indonesia yang mengimplementasikan otonomi daerah, yang memberi kewenangan lebih besar pada pemerintah daerah pada pengelolaan sumber daya dan keuangan. Penelitian ini penting untuk mengevaluasi bagaimana pemerintah daerah, pada hal ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, mengelola pengeluaran kas dalam kerangka otonomi tersebut.

2. Depkripsi Kasus

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan merupakan bidang akuntansi yang diterapkan pada unit-unit organisasi pemerintah. Fungsinya adalah untuk mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, dan melaporkan seluruh transaksi keuangan negara yang dilaksanakan oleh unit kerja tertentu. Ruang lingkupnya tidak hanya terbatas pada pencatatan keuangan namun juga mencakup penganggaran di seluruh lini pemerintahan.

Tujuan utama dari akuntansi pemerintahan, menurut Sambali dkk. (2024), meliputi akuntabilitas, manajerial, dan pengawasan. Akuntabilitas berfokus pada pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya yang efisien, efektif, ekonomis, dan bijaksana. Aspek manajerial mendukung perencanaan dan pengelolaan keuangan melalui instrumen seperti APBN. Sementara itu, aspek pengawasan memfasilitasi pemeriksaan keuangan negara oleh lembaga audit seperti BPK-RI.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berfungsi sebagai pedoman baku dalam pelaporan keuangan pemerintah. Menurut Gerung dkk. (2020), salah satu prinsip pengakuan dalam SAP adalah pengakuan pengeluaran pada saat dana dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara atau Daerah. Prinsip ini juga dianut dalam peraturan pelaksana seperti Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan perubahannya. Pengelolaan keuangan daerah harus dilandasi oleh asas-asas umum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, mencakup tertib, taat hukum, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Khusus mengenai efisiensi, diartikan sebagai upaya mencapai keluaran yang maksimal dengan masukan tertentu, atau menggunakan masukan yang seminimal mungkin untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan.

Sistem dan Prosedur

Dalam konteks keuangan, sistem merujuk pada kumpulan komponen yang saling terhubung untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan. Prosedur merupakan rangkaian langkah kerja yang teratur dan melibatkan berbagai pihak, dilengkapi dengan aturan untuk menjamin konsistensi pelaksanaan. Sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas, menurut Aulya dkk. (2021), terbagi ke dalam empat sub-sistem utama. Keempat sub-sistem tersebut adalah Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas untuk Uang Persediaan (UP), untuk Ganti Uang Persediaan (GU), untuk Tambahan Uang Persediaan (TU), dan untuk Pembayaran Langsung (LS).

Analisis Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah berfungsi sebagai cerminan kondisi dan kinerja keuangan suatu entitas. Bagi pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat, laporan ini menjadi dasar evaluasi. Proses analisis laporan keuangan sangat krusial untuk menilai kesehatan keuangan, memahami kinerja, serta mengidentifikasi kecenderungan dan pola yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan strategis di masa yang akan datang.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah kerangka kerja yang terdiri dari prinsip, metode, dan mekanisme yang diterapkan untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi pemerintah secara efektif dan efisien, serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Implementasi SPIP adalah tanggung jawab kolektif seluruh jajaran pimpinan dan individu dalam organisasi, bukan hanya tanggung jawab unit tertentu. Tujuan SPIP adalah multidimensional. Pertama, untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan memastikan sumber daya publik digunakan secara optimal. Kedua, untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Ketiga, untuk mengidentifikasi berbagai risiko, baik keuangan maupun non-keuangan, yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Keempat, untuk memperkuat pengendalian internal guna mencegah terjadinya penyimpangan, kecurangan, atau

penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, SPIP berperan sebagai pilar penting dalam menciptakan pemerintahan yang kredibel dan bertanggung jawab.

Belanja Langsung (LS)

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, belanja didefinisikan sebagai seluruh pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Belanja Langsung merupakan kategori belanja yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Komponen Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas

Sistem akuntansi pengeluaran kas mengatur seluruh proses yang berkaitan dengan pengeluaran uang tunai dan setara kas. Tanggung jawab atas pengeluaran kas ini berada pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Proses tersebut mencakup aktivitas mulai dari penerimaan, penyimpanan, pencairan, pembayaran, hingga pertanggungjawaban. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 210/PMK.05/2022, pembayaran langsung adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada pihak penerima berdasarkan perintah atau perjanjian kerja. Prosedur pengeluaran kas untuk belanja langsung mengikuti alur yang telah ditetapkan. Pertama, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) setelah memeriksa kelengkapan dokumen tagihan. SPP-LS ini kemudian disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). Selanjutnya, PPSPM akan menguji dan, jika memenuhi syarat, menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) secara elektronik. Tahap akhir, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) setelah melakukan pemeriksaan terhadap SPM-LS, sehingga dana dapat dicairkan dan dibayarkan oleh bendahara pengeluaran kepada pihak ketiga yang berhak.

3. Metodologi

Penelitian ini dilakukan dengan menitikberatkan analisis pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Objek penelitian yang digunakan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara per Desember 2024. Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian mengandalkan dokumentasi sebagai sumber data primer dan kajian pustaka sebagai sumber data sekunder.

Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih untuk memahami secara lebih mendalam dan kontekstual mengenai tantangan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Metode ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mendeskripsikan angka-angka yang tersaji dalam laporan keuangan, tetapi juga untuk menginterpretasikan makna di balik data tersebut, menganalisis pola, serta menghubungkannya dengan kondisi riil dan regulasi yang berlaku.

Data primer penelitian ini bersumber dari dokumen resmi, yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun 2024. Dokumen ini menjadi fondasi analisis karena merepresentasikan hasil akhir dari seluruh proses akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah selama satu periode anggaran. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka yang mendalam terhadap berbagai literatur pendukung, seperti peraturan perundang-undangan, buku referensi, artikel jurnal

ilmiah, dan publikasi resmi lainnya yang terkait dengan akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, dan analisis laporan keuangan daerah.

Sinergi antara analisis terhadap data primer dan data sekunder ini dirancang untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana kinerja keuangan yang tercatat dalam laporan tersebut merefleksikan upaya pembangunan daerah, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung maupun penghambat, serta memberikan gambaran yang mendalam tentang efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara.

4. Hasil dan diskusi

Analisis Pengeluaran Kas Belanja Langsung Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

Provinsi Sulawesi Utara, dengan ibu kota Manado, merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di ujung utara Pulau Sulawesi. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara. Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan serta seluruh transaksi yang dilakukan pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Dalam konteks ini, belanja langsung merupakan komponen utama yang mencakup beberapa kategori penting dalam pengelolaan keuangan publik, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Tabel 1. Realisasi Belanja Langsung Desember 2024

Akun	Anggaran	Realisasi	%
PENDAPATAN DAERAH	3.965,84 M	2.825,07 M	71,23
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.636,00 M	1.315,66 M	80,42
- Pajak Daerah	1.275,50 M	1.074,69 M	84,26
- Retribusi Daerah	256,96 M	149,33 M	58,11
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	70,82 M	71,76 M	101,33
- Lain-lain PAD yang Sah	32,72 M	19,87 M	60,74
Transfer dari Pemerintah Pusat (TKDD)	2.328,97 M	1.508,54 M	64,77
Pendapatan Lainnya (Hibah)	0,88 M	0,86 M	98,63
BELANJA DAERAH	3.958,67 M	2.370,52 M	59,88
Belanja Langsung			
- Belanja Pegawai	1.525,06 M	1.079,02 M	70,75
- Belanja Barang dan Jasa	929,06 M	589,24 M	63,42
- Belanja Modal	445,81 M	109,08 M	24,47
Belanja Tidak Langsung			
- Belanja Lainnya	1.058,74 M	593,18 M	56,03
-- Belanja Bagi Hasil	578,57 M	356,12 M	61,55
-- Belanja Bunga	32,31 M	6,36 M	19,69
-- Belanja Subsidi	7,26 M	3,77 M	51,85

Akun	Anggaran	Realisasi	%
-- Belanja Hibah	429,87 M	226,01 M	52,58
-- Belanja Bantuan Sosial	1,22 M	0,48 M	39,25
-- Belanja Tidak Terduga	9,51 M	0,45 M	4,74
PEMBIAYAAN DAERAH	-7,17 M	-83,40 M	1.163,05
Penerimaan Pembiayaan (SILPA Tahun Lalu)	253,12 M	0,00 M	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	260,29 M	83,40 M	32,04
- Penyertaan Modal Daerah	30,00 M	30,00 M	100,00
- Cicilan Pokok Utang	230,29 M	53,40 M	23,19

Analisis Prosedur Pengeluaran Kas Belanja Langsung

Dari data yang tersaji, dapat dianalisis struktur anggaran dan realisasi belanja langsung sebagai berikut. Total anggaran belanja daerah adalah sebesar Rp 3.958,67 miliar, dengan realisasi mencapai Rp 2.370,52 miliar atau sekitar 59,88%. Angka ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah masih memiliki ruang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyerapan anggaran. Prosedur pengeluaran kas perlu menjamin bahwa setiap pengeluaran tidak hanya sesuai dengan rencana anggaran, tetapi juga dilaksanakan tepat waktu untuk mendukung percepatan pembangunan.

Pada komponen belanja langsung, Belanja Pegawai mencatat realisasi tertinggi sebesar 70,75% dari anggaran Rp 1.525,06 miliar. Realisasi ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam pemenuhan hak aparatur sipil negara. Namun, proporsi belanja pegawai yang besar juga menjadi tantangan karena dapat mengurangi porsi alokasi untuk belanja modal yang bersifat investatif. Selanjutnya, Belanja Barang dan Jasa merealisasikan 63,42% dari anggaran Rp 929,06 miliar. Belanja ini penting untuk mendukung operasional pelayanan publik. Tantangan utamanya terletak pada pengadaan barang/jasa yang transparan dan akuntabel untuk meminimalkan risiko inefisiensi.

Yang paling mengemuka adalah realisasi Belanja Modal yang hanya mencapai 24,47% dari pagu Rp 445,81 miliar. Rendahnya penyerapan anggaran untuk investasi infrastruktur dan fasilitas publik ini dapat menghambat percepatan pembangunan daerah. Faktor penyebabnya kemungkinan meliputi perencanaan proyek yang kurang matang, proses lelang yang panjang, atau kendala teknis di lapangan. Peningkatan realisasi belanja modal menjadi hal yang krusial dan memerlukan perbaikan sistem perencanaan serta pengawasan yang lebih ketat.

Lingkungan Pengendalian Internal terhadap Pengeluaran Kas

Lingkungan pengendalian internal memegang peran sentral dalam memastikan pengeluaran kas belanja langsung dilakukan secara efisien, efektif, dan akuntabel. Berdasarkan analisis realisasi anggaran, terlihat bahwa Proses Penganggaran dan Perencanaan perlu dievaluasi. Tingkat realisasi belanja daerah secara keseluruhan yang berada di bawah 60% mengisyaratkan potensi masalah dalam perencanaan yang kurang realistis atau hambatan dalam eksekusi. Penganggaran kedepannya perlu lebih berbasis kinerja dan kebutuhan riil lapangan. Aspek Pengawasan dan Audit harus diperkuat. Keberadaan instansi pengawasan internal seperti Inspektorat Provinsi menjadi vital untuk melakukan audit secara berkala. Audit tidak hanya berfokus pada kepatuhan, tetapi juga pada nilai manfaat (*value for money*) dari setiap pengeluaran, khususnya untuk

belanja barang/jasa dan modal. Temuan audit harus ditindaklanjuti secara serius untuk perbaikan berkelanjutan.

Terakhir, Akuntabilitas dan Transparansi serta Pelatihan Sumber Daya Manusia merupakan pilar pendukung. Transparansi dapat ditingkatkan dengan publikasi laporan keuangan dan realisasi anggaran yang mudah diakses oleh publik. Sementara itu, peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui pelatihan berkelanjutan mengenai pengelolaan keuangan daerah, prosedur pengadaan, dan sistem akuntansi akan mengurangi risiko kesalahan administratif dan meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran. Dengan pengendalian internal yang kuat, diharapkan realisasi anggaran, khususnya untuk belanja modal, dapat ditingkatkan sehingga tujuan pembangunan daerah dapat tercapai secara lebih optimal.

5. Simpulan

Hasil analisis terhadap sistem dan prosedur belanja langsung di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, capaian realisasi belanja secara keseluruhan belum optimal. Banyak target anggaran yang tidak tercapai, dan tingkat penyerapan anggaran sering kali rendah, terutama pada penghujung tahun anggaran. Di sisi lain, terdapat aspek kinerja anggaran yang positif dengan pelaksanaan yang efisien pada beberapa program, meskipun beberapa program lainnya belum berjalan secara optimal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meski telah ada kemajuan dalam pengelolaan belanja langsung, tetap diperlukan perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai tingkat akuntabilitas dan transparansi yang lebih baik dalam penggunaan anggaran publik.

Untuk meningkatkan efektivitas belanja langsung, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang sistematis. Pertama, penguatan sistem pengendalian internal dan transparansi dalam pelaporan keuangan mutlak diperlukan. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan pelatihan berkelanjutan bagi pegawai yang menangani keuangan daerah, agar mereka semakin mahir dalam prosedur akuntansi dan pengelolaan anggaran. Pemanfaatan teknologi informasi juga perlu ditingkatkan untuk mempermudah akses, pemantauan, dan pelaporan data keuangan secara real-time. Selain itu, evaluasi berkala terhadap program-program yang dilaksanakan harus menjadi bagian dari siklus anggaran. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, mengukur dampak yang dihasilkan, dan memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan implementasi langkah-langkah tersebut, diharapkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas belanja langsung Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dapat terus meningkat..

Referensi

- Agustin, R., Irwan, M., & Andriani, R. (2020). Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Pada Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Ekonomi Al-Khitmah* 2.2, 33–50.
- Aulya, A., Sunaningsih, S. N., & Acc, M. (2021). Analisis Pelaksanaan Sistem Prosedur Pengeluaran Kas Sekretariat Dprd Kota Magelang. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Mutiara Madani*, 9(Desember), 149–157.
- Dauhan, J. S., Kalangi, J. B., & Tolosang, K. C. (2020). Pengaruh Belanja Langsung Dan

- Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2008-2017. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(01), 55–61.
- Fathiny, A. A., Setiawati, D., & Nurhayati, S. (2021). Pengaruh Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Perencanaan Anggaran Pada. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(2), 64–77.
- Gerung, I. R., Kalangi, L., & Pusung, R. J. (2020). Analisis Tingkat Efisiensi Belanja Langsung Pada Sekretariat Daerah Kota Tomohon. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 417. <https://doi.org/10.32400/Gc.15.3.29452.2020>
- Karim, A. E., Blongkod, H., & Husain, S. P. (2023). Pengaruh Sistem Keuangan Desa Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal Of Economic, Bussines And Accounting (Costing)*, 7(1), 130–136. <https://doi.org/10.31539/Costing.V7i1.5963>
- Lumbangaol, J., Hutagalung, W. P., & Togatorop, D. (2022). Analisis Laporan Keuangan Pada Kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara. *Jurnal Global Manajemen*, 11(1), 138. <https://doi.org/10.46930/Global.V11i1.1595>
- Rafita, Imsar, & Harahap, M. I. (2021). Analisis Penyusunan Anggaran Belanja Langsung Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan (Studi Kasus Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu Utara). *J-Isacc Journal Of Islamic Accounting Competency*, 1, 1–16.
- Rahmat Hidayat, Runi Paga'ga', & Ningsi. (2022). Rasio Belanja Langsung Dan Tidak Langsung Terhadap Total Belanja Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 - 2021. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(3), 208–216. <https://doi.org/10.55606/Jurimea.V2i3.208>
- Rawung, M., Runtu, T., Afandi, D., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2023). *Analysis Of Systems And Procedures For Direct Cash Disbursements At The Regional Office Of The Ministry Of Religion Of North Sulawesi Province* (Vol. 11, Issue 3).
- Sambali, E. B., Tinangon, J. J., & Lintong, D. N. (2024). Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Pengeluaran Kas Belanja Langsung Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Riset Akuntansi Dan Manajemen Pragmatis*, 2(2), 241–255. <https://doi.org/10.58784/Ramp.228>
- Sitinjak, W. C. B. (2020). Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Pada Pt. Jasa Harapan Barat Tanjung Morawa. *Journal Information*, 10, 1–16.
- Tarigan, W. J., Sinaga, M. H., & Ginting, R. S. (2023). Penggunaan Anggaran Belanja Langsung Dalam Penganggaran Berbasis Kinerja Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ekuilnemi*, 5(1), 9–20. <https://doi.org/10.36985/Ekuilnemi.V5i1.490>

Declarations

Funding

The authors received no financial support for the research and publication of this article.

Conflicts of interest/ Competing interests:

The authors have no conflicts of interest to declare that are relevant to the content of this article.

Data, Materials and/or Code Availability:

Data sharing is not applicable to this article as no new data were created or analyzed in this study.